

PESANTREN SEBAGAI BENGKEL MORAL: OPTIMALISASI SUMBER DAYA PESANTREN UNTUK MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA

Fathul Lubabin Nuqul¹

Abstract

Juvenile delinquent is breaking law action that done by teenages. Juvenile delinquent becomes a global problem now. Many studies has found that fail of moral development is one of many factor potentially that appearing Juvenile delinquent. Parenting, school and community have a responsibility to protect children's moral development. Indonesian has education alternative model that is "*pesantren*". *Pesantren* can over taking all of education moral element (Family, school and community), and *pesantren* has resources which give to student (*santri*) moral cognition and moral emotion.

Key word: *Moral, delinquency, pesantren.*

A. Latar Belakang.

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang berpenduduk 220 juta jiwa. Dengan strata ekonomi yang rata-rata rendah dan perbedaan ideologi, strata sosial dan pendidikan. Saat ini sedang mengalami berbagai jenis krisis; krisis ekonomi, krisis nilai dan moral. Indikator dari krisis ini tercermin dari perilaku kejahatan yang terjadi, menurut Da'I Bactiar (mantan Kapolri), rata-rata potensi orang terkena kejahatan sama dalam 3 tahun terakhir, yaitu 86 orang per 100.000 penduduk pertahun (Tempo Interaktif, 2005). Data terbaru yang diungkapkan oleh Bapenas, menunjukkan bahwa dari 4 golongan jenis kejahatan dari tahun 2006 sampai dengan 2007 (Januari s/d Juni) adalah sebagai berikut : (a) kejahatan konvensional, pada tahun 2006 terjadi 168.685 kasus dan pada tahun 2007 terjadi 45.718 kasus; kejahatan transnasional, pada tahun 2006 terjadi 9.331 dan pada tahun 2007 terjadi 3.502 kasus; kejahatan kekayaan negara, pada tahun 2006 terjadi 4.327 kasus dan pada tahun 2007 terjadi 902 kasus; dan kejahatan berimplikasi kontijensi, pada tahun 2006 terjadi 273 kasus dan pada tahun 2007 terjadi 15 kasus.

¹ Dosen Psikologi Sosial Fakultas Psikologi UIN Malang, Alumni Pesantren dan pemerhati masalah remaja.

Data tersebut menunjukkan angka pelanggaran hukum di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Kelihatannya kejahatan dan pelanggaran hukum ini sepertinya akan sulit teratasi. Khusus untuk data kenakalan remaja belum ada data terbaru yang dirilis oleh pihak resmi, tetapi jika menilik tren data kasus pelaku kejahatan dikalangan remaja berikut yang menunjukkan gejala yang makin meningkat. Jumlah kejahatan kekerasan di kalangan remaja mengalami kenaikan secara mencolok sejak 1993 hingga 1995. Tahun 1993, jumlah kejahatan kekerasan remaja di Jakarta dan sekitarnya hanya 80 kasus, lalu meningkat lebih dari 125% pada tahun berikutnya (menjadi 183 kasus). Selain itu pada 1995 jumlah kejahatan kekerasan yang dilakukan kalangan remaja meningkat lagi menjadi 194 kasus. Dari 1993 hingga 1994 mengalami peningkatan yang sangat tinggi, dari 375 orang menjadi 1.261 orang. Untuk kasus khusus narkoba, diperkirakan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2001 mencapai 3,4 juta orang dan 80 persen dari mereka adalah remaja. Dari kajian secara global Bianchi melaporkan peningkatan jumlah penyalahguna narkoba, dari 180 juta tahun 2000 menjadi 185 juta tahun 2002, atau 4,2% penduduk usia 15-64 tahun. (BNN, 2007) Melihat data ini, kenakalan remaja sangat mengkhawatirkan, karena hampir tak ada bedanya antara intensitas kejahatan yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa. Untuk itu artikel ini ingin membahas tentang kenakalan remaja dari sudut pandang psikologi dan moralitas.

B. Kenakalan Remaja.

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin "*delinquere*" yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka

mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. (Kartono, 2003, lih juga Flower, 2002).

Definisi yang sama juga di kemukakan oleh Hurlock (1998), Sarwono (2003) dan Santrock (2003). Gunarsa (1988), mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu: (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum; (2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam menentukan apakah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dianggap sebagai kenakalan remaja atau perbuatan kriminalitas ditentukan oleh usia di pelaku dalam hal ini yang telah diatur dalam sistem hukum suatu negara. Kenakalan dalam agama Islam, menurut Daradjat (1985), telah sangat jelas ditentukan bahwa setiap perbuatan kriminalitas merupakan perbuatan dosa karena melanggar hukum agama dan negara tentunya. Perilaku kenakalan remaja yang masih belum *aqil baligh* (di bawah 15 tahun) tidak dituntut tanggung jawabnya, melainkan orang tuanya diminta untuk mendidiknya. (Daradjat, 1985). Dalam tatanan hukum, beberapa negara misalnya, Amerika, Hongkong, India dan Indonesia, membedakan sanksi yang diterima oleh pelaku kejahatan yang berusia dewasa dan yang masih (Stanford, 2004)

Apapun sistem hukum yang berlaku di sebuah negara, terdapat sebuah kesepakatan yaitu kenakalan remaja sebagai problem sosial (Gibbs, et al 2006), bahkan merupakan problem Global (Stanford, 2004). Apa penyebab kenakalan remaja? Pertanyaan ini tak mudah dijawab. Berbagai konsep dan teori dikemukakan untuk memahami kenapa remaja melakukan tindakan kriminalitas.

Perspektif biologis dari Lambroso (Flower, 2002), menjadi penentu perilaku konsep biologis sebagai penentu kriminalitas banyak ditentang. Dikemukakan, di sisi lain, bahwa faktor pemikiran dan emosilah yang penting dalam penilaian seseorang tentang benar dan salah, atau yang disebut dengan moralitas (Kohlber, 1981). Kaitan antara moral dan kriminalitas sangat erat. Tanpa aturan moral (*moral rules* yaitu kewajiban tatanan sosial berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan orang lain), masyarakat akan mengalami kebingungan dan tanpa aturan/tak tertata. Sebagai contoh banyak masyarakat menyepakati bahwa beberapa perilaku seperti membunuh dan mencuri adalah salah dan banyak orang yang mengikuti prinsip moral ini.

Daradjat memperinci beberapa faktor yang menyebabkan kenakala remaja yaitu: 1). Kurangnya pendidikan agama, sehingga anak kehilangan pegangan nilai, yang kemudian superegonya kosong; 2). Kurangnya pengetahuan orang tua akan pendidikan; 3). Kurang teraturnya pengisian waktu luang; 4). Tidak stabilnya kondisi ekonomi, sosial dan politik; 5). Kemerosotan moral dan mental orang dewasa; 6). Banyaknya film dan bacaan yang kurang mendidik; 7). Pendidikan di sekolah yang kurang baik; 8). Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan moral anak kurang. (Daradjat, 1985).

Poin-poin di atas secara garis besar dapat disimpulkan, ada tiga sumber pendidikan yang bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan moral anak, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga untuk menanggulangi kelemahan moral anak tersebut maka, ketiga sumber ini harus dioptimalkan perannya. Tetapi untuk mengoptimalkan ketiganya (dalam kondisi sebenarnya) membutuhkan waktu yang lama atau dengan kata lain harus ada proses yang rumit. Untuk itu diperlukan formula yang mampu memberikan pendidikan moral dengan melibatkan ketiga unsur tersebut secara simultan. Salah satunya yang ditawarkan adalah pendidikan pesantren. Diharapkan pesantren mampu mengoptimalkan peran unsur pendidikan tersebut, karena secara praktis seorang santri akan hidup selama 24 jam sehari di pesantren dan pembina pesantren menggantikan ketiga unsur tersebut di atas.

Untuk itu artikel ini mencoba untuk membahas perkembangan moral dan alternatif pendidikan moral sekaligus menggali khazanah kekayaan pendidikan pesantren dalam memecahkan problem kenakalan remaja di Indonesia.

C. Moralitas

Moralitas adalah seperangkat standar dari seseorang tentang apa "yang benar" dan "yang salah" pada berbagai perilakunya. Secara universal Kohlberg mengatakan yang menjadi kebenaran secara universal termaktup dalam orientasi moral yaitu tatanan normatif, keadilan, akibat perbuatan dan diri yang ideal. Orientasi moral ini menjadi dasar pertimbangan moral (*moral reasoning*) perilaku. Dalam sebuah komunitas atau kelompok tertentu mesti ada norma yang dijadikan standar yang mengatur bagai anggotanya berperilaku. Di Indonesia ada nilai Pancasila yang meliputi 5 sila yang menjadi pandangan hidup (*way of life*) bagi bangsa Indonesia.

Dalam agama Islam, standar kebenaran dalam berperilaku disebut *akhlaq*. Al-Ghozali mendefinisikan akhlaq sebagai sifat yang tertanam yang dalam jiwa, yang dari sifat tersebut timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan terlebih dulu (Suti'ah, 2003). Dari akhlaq ini perbuatan muncul secara otomatis di luar kesadaran. Secara aksiologi, Suti'ah (2003) membedakan antara akhlaq dan moral. Akhlaq bersumber dari wahyu (Al-Quran dan Hadist) sedangkan moral berasal dari nilai sekuler. Meskipun demikian dari sisi universalitas moral kemanusiaan, pendidikan moral pada dasarnya dapat bersumber pada ajaran akhlaq suatu agama. Dalam tataran praktis antara moral dan akhlaq tidak berbeda, yang keduanya termanifestasi dalam perilaku.

Penentuan perilaku moral seseorang antara satu individu dengan individu yang lain tidak selalu sama. Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan dari standar tersebut dari waktu ke waktu. Perkembangan moral menentukan bagaimana seorang individu menilai dunia luarnya, perkembangan moral ini membedakan antara anak kecil dan orang dewasa dalam hal penilaian baik buruk sebuah perilaku.

1. Tingkat Perkembangan Moral.

Piaget dan Kohlberg (1981), mengatakan bahwa penilaian moral berhubungan dengan perkembangan kognitif seseorang yang beroperasi ketika membuat penilaian. Individu tidak dapat mencapai pada tingkat yang lebih tinggi sampai dia juga mengalami kemajuan yang lebih tinggi dalam perkembangan kognitif. Kohlberg memperluas teorinya Piaget dengan meneliti bagaimana individu mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah dari sebuah tindakan dan bagaimana individu secara nyata berperilaku. (Kohlberg 1981)

Kohlberg (1981) mengatakan bahwa terdapat tiga level (masing-masing mempunyai 2 tingkat) dari pertimbangan moral. Level pertama dinamakan dengan *preconventional level*, pada tingkatan ini seorang merasa benar atau salah berdasarkan setting aturan eksternal yang dikendalikan oleh figur otoritas seperti orang tua, guru maupun agamawan (mis:Kyai). Aturan ini menurut tingkatan ini harus dipatuhi agar terhindar dari hukuman dan mendapatkan reward. Dengan kata lain orang pada tingkatan moral ini, seseorang tidak mencuri obat, bukan karena dia percaya bahwa mencuri obat merupakan pelanggaran tetapi karena mereka takut dihukum atas perilakunya.

Level kedua dari pertimbangan moral adalah *conventional level* yaitu penilaian baik buruk berdasarkan harapan dari orang lain. Pada level ini ada dua subtingkat, pertama, misalnya, seseorang dikenal sebagai *the "good boy/nice girl" orientation*, dimana moralitasnya berdasarkan pada mendapatkan pujian dan menghindari celaan orang lain di kelompoknya. Dengan kata lain, orang akan memutuskan mencuri, atau tidak, obat tersebut tergantung pada apakah dia percaya bahwa teman-temannya akan berfikir sama dengan dirinya. Pada subtingkat yang kedua, disebut dengan *"law and order" orientation*, yaitu perilaku moral merupakan bentuk dari kepatuhan dari figur otoritas dan keberadaan tatanan sosial. Tatanan sosial mengacu pada fungsi budaya dan masyarakat, aturan dan standar yang dipegang oleh anggota masyarakat. Hukum biasanya dipatuhi tanpa sanggahan dan mengabaikan situasi serta dianggap sebagai mekanisme untuk menjaga tatanan sosial. Seseorang yang beroperasi pada tingkatan moral ini tidak mencuri karena mencuri merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Pertimbangan moral yang ketiga disebut dengan *post-conventional orientation*, pada tingkatan ini seseorang lebih memperhatikan komitmen pada prinsip yang lebih tinggi dari perilaku yang dituntun oleh aturan sosial. Dengan kata lain seseorang menentukan perilakunya tidak atas dasar pamrih tetapi lebih pada prinsip moral internal individu. Sebagai contoh para pahlawan kemerdekaan yang disiksa di penjara karena pembangkangan terhadap penjajah, tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk memerdekakan negara

Menurut Kohlberg, tingkat *pre-conventional* adalah karakteristik dari anak-anak, sedangkan tingkat konvensional lebih mengindikasikan pada populasi umum. Diperkirakan bahwa hanya sekitar 20 persen orang dewasa yang mencapai tingkat *postconventional*. Penyebab perkembangan moral pada tiap orang tidak sama pada setiap orang, bahkan banyak orang dewasa yang berada pada tingkatan moral pre-operational. Pendidikan, pengasuhan orang tua, imitasi dan penjelasan tentang akibat sebuah perilaku merupakan faktor-faktor yang menentukan penyebab perkembangan moral anak-anak.

Para pelaku kejahatan mempunyai kecenderungan mengalami keterlambatan dalam perkembangan moral. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Le Sage (Stam, et.al, 2008) pada laporan yang digunakan untuk membantu menentukan hukuman pada 43 pelaku kejahatan remaja yang melakukan pelanggaran orientasi moral, dan ditemukan bahwa 75% pelaku kejahatan didiagnosa mempunyai keterlambatan serius dalam perkembangan moral.

2. Moral dan Kenakalan Remaja

Dari pandangan teoritis dan praktis, untuk lebih memahami perilaku *antisocial* dan *prosocial* dalam perilaku *delinquent* dan *non delinquent* remaja dibutuhkan pemahaman perkembangan moral, Secara teoritis, ada beberapa faktor yang membentuk seperti pertimbangan *sociomoral* sebagai komponen kognitif dan empati sebagai elemen efektif telah diperkirakan dapat menjelaskan moralitas yang berhubungan dengan perilaku pada remaja dan menunjukkan perbedaan antara remaja nakal dan yang tidak. Gibbs (2003) menjelaskan bahwa dua komponen di atas (*social moral* dan empati) sangat penting dan

mempunyai kontribusi pada perilaku moral. Keinginan berperilaku secara moral dapat muncul baik dari sisi konstruk kognitif dalam sebuah situasi seperti ketidakadilan maupun berempati terhadap korban yang tertindas.

Menurut pendekatan perkembangan kognitif moral (Blasi 2005; Kohlberg 1981) perilaku hanya dapat menjadi moral ketika perilaku tersebut ditimbulkan/dimotivasi oleh *moral judgment*. Bentuk yang paling penting, *moral judgment* mengambil karakter moral dari kriteria formal. Misalnya keadilan, tidak berpihak, dan alih peran. Dalam pandangan Kohlberg, kenakalan remaja akan dilihat secara moral berada pada tingkatan yang paling rendah, sedangkan tingkat yang lebih tinggi berfungsi sebagai benteng terhadap agresifitas, perilaku antisosial dan perilaku delinquent. Tingkat moral itu juga penting bahwa kebahagiaan orang lain termasuk di dalamnya.

Pada tingkatan pertama (*moral egosentris*) "pelanggaran dibenarkan jika hukuman dapat dihindari sebagai contoh mencuri boleh asal tidak tertangkap". Pada tingkatan moral ke-2 (timbang balik moral sebagai realita) "pelanggaran diperbolehkan jika keuntungan lebih besar dari modal atau tenaga yang dikeluarkan" (Palmer, 2003). Gibbs et al (2007) menekankan bahwa tingkat ke-3 (timbang balik moral ideal) merupakan sebuah pencapaian penting dalam perkembangan moral, hal ini berdasarkan kemampuan melakukan pengamatan sosial, yang mengimplikasikan kematangan pengertian moral. Moral tingkat 3 telah dikenal pada masa awal remaja dan menjadi modal menganalisis moral sosial global pada masa akhir remajanya kelak (Gibbs, et al, 2007). Tingkat moral 4 (instutisional) mulai pada akhir masa remaja dan merupakan kelanjutan dari kematangan moral tingkat 3 dengan lebih mengerti tentang hubungan interpersonal dalam interaksi sosial yang kompleks. Pandangan moral pada tingkat 4 akan membuat seorang remaja berhubungan dengan tindakan antisosial termasuk pada orang asing. Moral tingkat 5 (kontrak sosial atau orientasi hak individu) hanya mampu dicapai sedikit orang. Bahkan Gibbs (2003) mengatakan bahwa moral tingkat 5 merupakan bentuk dari penjelasan *meta-ethical* yang terabaikan dari modelnya Kohlberg. Tingkat ini tak didapat secara spontan tetapi harus melalui pendidikan formal dan perguruan tinggi.

Untuk menegaskan kembali hubungan moral dengan kenakalan remaja, Gibbs (2006); Pizarro & Bloom (2003) menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat penilaian moral meningkatkan resistensi terhadap tingkatan rendah dalam konteks perilaku moral. Dengan kata lain makin tinggi perkembangan moral seseorang maka akan makin kecil kemungkinan melakukan pelanggaran. Dalam *meta-analysis* yang dilakukan oleh Stams et.al. (2006; 2008), menunjukkan bahwa perkembangan *moral judgment* yang terlambat berhubungan dengan kenakalan, bahkan ketika dikontrol dengan latar belakang sosio-ekonomi dan budaya, gender, usia, inteligensi, bias publikasi dan pengukuran, institusi dan periode penelitian, hasilnya sama. Jadi semakin kuat bahwa keterlambatan perkembangan moral akan berakibat pada tingkat tanggung jawab pada aturan, pelaku kejahatan remaja mungkin tidak secara penuh menanggung penuh tanggung jawab (akibat) dari perilaku mereka. jika mereka tidak mempunyai pemahaman mana yang benar dan mana yang salah (*moral cognition*) atau kemampuan untuk merasakan empati pada korban (*moral emotional*).

D. Pesantren: Benar-benar Bengkel Moral

Bagi kelompok empirisme, Kemampuan individu melakukan penilaian moral dan perilaku moral tidak ditentukan oleh faktor genetik. Sebaliknya Aspek pendidikan moral anak dipengaruhi oleh orang tua di rumah, guru di sekolah dan masyarakat (Nata, 1996). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pendidikan moral dilakukan di dalam keluarga, Calhoun & Accocella (1995) menyatakan bahwa standar yang digunakan oleh orang tua akan digunakan oleh anak sebagai standar dalam berinteraksi dengan orang lain. Begitu juga dengan Bandura, mengatakan bahwa seorang anak akan meniru apa yang diperbuat oleh orang dihadapannya tanpa pernah berfikir apakah yang dilihatnya tersebut baik atau buruk. (Bandura, 1989). Hal ini mengindikasikan bahwa dasar moral anak tertanam sejak dari kehidupan pertama dalam keluarga. Tetapi ketika tidak banyak keluarganya mampu melaksanakan pendidikan nilai dan moral pada anak-anak mereka di rumah. dan dalam penanaman nilai moral. Keluarga terlalu menyerahkan pendidikan anak pada pihak sekolah, sedangkan sekolah bahwa sebagian besar kehidupan anak berada di luar sekolah dan sekolah hanya

memberikan apa yang ditancumkan dalam kurikulum. Beban sekolah menjadi semakin berat dengan "harus" memuluskan siswa mereka dalam Ujian Nasional yang materinya hanya pada ranah kognitif.

Masyarakat saat ini telah mengalami penurunan sensitivitas terhadap kenakalan remaja. Bahkan Masyarakat, dalam hal ini media, menjadi "hedonis", hanya mementingkan keuntungan diri sendiri dengan cenderung menampilkan tayangan yang menghasilkan uang banyak tetapi tidak mendidik bagi moral bangsa. Untuk ada formulasi pendidikan moral yang cocok untuk mendidik moral generasi bangsa ini. Salah satu (mungkin juga satu-satunya) yang konsep pendidikan yang baik untuk pendidikan moral adalah pesantren.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkarakter pribumi, sehingga pengembangan Islam melalui institusi ini memiliki peluang besar untuk dapat diterima di masyarakat. (A'la, 2006) Dhofier merinci tujuan pendidikan pesantren meliputi meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan tingkah-laku yang jujur dan bermoral, dan mempersiapkan para santri untuk hidup sederhana dan bersih hati. Lebih lanjut, ia menegaskan tujuan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, melainkan ditanamkan bahwa belajar semata-mata adalah kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan (Dhofier, 1982). Untuk mencapai tujuan tersebut pesantren berpijak pada paradigma dasar bahwa seluruh kehidupan dipandang sebagai ibadah. Melalui paradigma ini, pesantren memiliki pandangan bahwa perspektif Islam meliputi ibadah formal dan ibadah sosial dilihat dari perilaku yang membawa keuntungan bagi pelaku dan masyarakat luas.

Pesantren sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kemampuan moral dan nilai kemanusiaan, tak salah pesantren sejak dulu dianggap sebagai bengkel moral. Peran pesantren terhadap pendidikan moral bagi santri sangat berat, karena harus meng-cover ketiga aspek eksternal pendidikan bagi anak, dengan kata lain pesantren harus menggantikan peran keluarga, guru di sekolah dan harus menciptakan masyarakat yang sehat. Dengan peran yang sangat besar pesantren harus ekstra keras memformulasikan pola pembinaan dan pendidikan yang mampu *full power* dalam menciptakan ketangguhan moral

santri. Hal itu sangat mungkin jika pesantren mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensinya untuk tetap fokus dalam pembinaan moral dan akhlaq santri.

Berikut ini metode pembelajaran moral di pesantren yang mengoptimalkan potensi pesantren;

1. Pengajian Kitab Kuning Untuk *Moral Cognition*.

Metode utama yang dilakukan oleh pesantren salaf adalah pengajian kitab kuning. Pada umumnya pengajian yang menjadi tulang punggung pengajaran di pesantren mengikuti pola tradisional, yaitu model *sorogan* dan model *bandongan*. Kedua model ini Kiai aktif dan santri pasif. Secara teknis model sorogan bersifat individual, yaitu santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari, sedangkan model *bandongan* (*weton*) lebih bersifat pengajaran klasikal, yaitu santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling Kiai menerangkan pelajaran secara kuliah dengan terjadwal. Baik dengan model sorogan maupun *bandongan* dilakukan dengan pembacaan kitab yang dimulai dengan pembacaan tarjamah, syarah dengan analisis gramatikal, peninjauan morfologi dan uraian semantik. Kyai sebagai pembaca dan penerjemah, bukanlah sekadar membaca teks, melainkan juga memberikan pandangan-pandangan (interpretasi) pribadi, baik mengenai isi maupun bahasanya. Dalam Pengajian santri mendapatkan pembelajaran tentang banyak hal dari ilmu alat, fiqh dan tauhid, sampai pada ahlaq atau moral (Priyono, 2006).

Pengajian merupakan bagi santri mendapatkan bekal moral kognitif. Dari pengajian, santri diharapkan mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Dari proses inilah transfer nilai dilakukan, baik yang bermuatan *moral cognition* maupun *moral emotion*. Pengajian di pesantren bisa mengeksplorasi kisah teladan materi pengajian, misalnya, dengan mengedepankan hikmah dari kisah tersebut. Sebagai contoh, dalam kisah al-Quran ada kisah tentang Fir'aun dengan kesombongannya yang menghancurkan dirinya. Kisah Qorun, yang *Tama'* dan harus mati tertimbun harta. Pada zaman nabi Muhammad, SAW ada kisah Sa'labah yang dari miskin menjadi kaya tetapi perubahan status tersebut tidak membuat dia menjadi lebih bersyukur.

Dalam Al Quran selain ada kisah-kisah negatif ada juga keteladanan yang bisa diambil nilai positifnya. Misalnya kesabaran Nabi Ayub AS dalam menghadapi penyakitnya. Kekukuhan prinsip nabi Ibrahim AS pada saat mengorbankan anaknya dan pada saat harus menantang raja Namrud, dan yang tak kalah indahnya adalah kisah Nabi Muhammad penuh dengan Hikmah. Selain hikmah kisah yang jelas tertera di Al Quran, pesantren juga banyak mengkaji kitab-kitab yang berisi pesan akhlaq yang agung, sebut saja. *Ihya' Ulumuddin*, *Irsyadul I'bad*, *Nasyoihul I'bad*, untuk anak-anak ada *washoya*, *akhlaqul lil banat* dan *akhlaqul lil banin* dan lain sebagainya. Kekayaan khazanah inilah yang sebenarnya harus disadari oleh masyarakat yang peduli pendidikan untuk mendidik moral bangsa.

2. Keteladanan (Modelling)

Santri harus mendapatkan contoh atau keteladanan dari nilai-nilai pendidikan yang diterimanya dalam lingkungan tempat dia berada. Tidak ada kesenjangan antara apa yang dipelajari di pesantren, sekolah, dan rumah serta masyarakat. Pemberian contoh dan keteladanan dari pendidik tentang penerapan moral dalam kehidupan nyata sangat diperlukan. Santri atau peserta didik lainnya tidak hanya dijejali dan diperkenalkan tentang konsep-konsep moral, sedangkan pendidiknya tanpa terasa dan tanpa sadar telah menjerumuskan peserta didiknya, dengan memperlihatkan dalam perbuatan amoral dihadapan peserta didiknya. *Social learning theory* dari Bandura memfokuskan pada perilaku aktual anak seperti kekerasan, mencuri, berbohong, menolong orang lain, muncul karena proses imitasi (Bandura, 1989), hal ini mengingatkan pendidik tentang pentingnya keteladanan dan contoh pembelajaran moral yang tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari pelaksanaannya kurang melekat dalam ingatan santri terutama yang berada pada masa remaja awal. Kecurangan, ketidak adilan dan perilaku a moral lainnya yang dilihat sehari-hari dapat menimbulkan konflik dalam diri anak dan ketidak percayaan akan kebenaran norma di masyarakat.

Proses imitasi dan *modelling* juga bisa berasal dari tayangan televisi, bahan bacaan bahkan internet. Celaknya sumber-sumber ini sulit dikontrol isinya.

Eysenck & Nias (1978). Mengatakan bahwa membaca dan melihat tayangan-tayangan seks dan kekerasan dapat berpengaruh kepada perilaku seseorang. Media seperti Televisi, film, pertunjukkan, majalah porno, serta iklan, yang makin hari semakin bebas menonjolkan seks dan kekerasan, sudah sangat berpengaruh terhadap peningkatan penyimpangan seks dan kekerasan di masyarakat, seperti meningkatnya kejahatan, vandalisme, seks bebas pranikah, penyimpangan perilaku, pemerkosaan, dan kejahatan seks lainnya. Untuk itu seharusnya masyarakat meninjau ulang tayangan-tayangan media-massa agar dampak perusakannya tidak makin berlebihan yang akan menjadikan moralitas masyarakat makin tercabik-cabik di kemudian hari. Tetapi dengan dalih kebebasan pers, kontrol materi tawangan media menjadi sangat sulit.

Pesantren mempunyai formula untuk membendung efek negatif ini. Dengan membatasi penggunaan media komunikasi yang tidak perlu, serta meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Usaha kuratif juga harus dibarengi dengan usaha preventif, pesantren mempunyai figur kyai, guru dan pembina yang mampu sebagai model positif (sebagai tindakan Preventif) untuk pembentukan perilaku, yang ditampilkan dalam bentuk cerita napak tilas, bahan bacaan atau sampai pada kehadiran langsung figur tersebut di pesantren. Cara lain untuk *model exposure* lainnya adalah memberdayakan *peer group* yang berpotensi sebagai prototipe santri sebagai bahan perbandingan bagi santri lainnya.

3. Role Playing untuk meningkatkan empati.

Hoffman menilai empati menjadi inti dari moralitas, selama moral mengimplikasikan berempati dengan orang yang berpotensi menjadi korban. Empati didefinisikan dengan sebuah respon afektif terhadap distress atau problem yang dialami orang lain, (Hoffman 2000). Hoffman menilai perkembangan moral sebagai proses sosialisasi dimana anak-anak menginternalisasi norma dan nilai dari orang tua mereka. Untuk kesuksesan internalisasi, orang tua hendaknya mengfokuskan pada perhatian anak pada akibat dari perilakunya terhadap orang lain. Sebagai hasilnya, anak merasa harus

mematuhi aturan moral dan keharusan mematuhi moral tersebut berasal dari faktor instintik bukan karena takut sanksi dari luar. (Hoffman, 2000).

Hubungan antara perkembangan pertimbangan moral dan empati cukup kompleks dan saat ini pandangan tersebut belum diterima. Tetapi jelas bahwa egisentrisme merupakan sesuatu yang berada dalam lever paling bawah dari pertimbangan penilaian moral dan empati. Pizarro (2000) menekan dua hal yaitu kapasitas pengalaman empati (*moral emotion*) dan kemampuan untuk mengatur empati secara efisien (*moral cognition*), dibutuhkan seseorang dalam moral individu. Seseorang yang tidak mempunyai pengalaman emosi moral mungkin mampu memberikan penjelasan tentang isu moral secara baik juga tidak mampu merespon situasi kehidupan nyata secara baik, selama dia tidak diberitahu tentang distres yang dialami oleh orang lain.

Empati ini perlu diasah, sehingga kepekaan santri pada perasaan orang lain makin tajam, sehingga jika makin tajam perasaannya, semakin tajam akan budinya, sehingga dorongan untuk berperilaku agresif pun akan terkendali. Sebaliknya jika rasa empati pada orang lain telah semakin tumpul maka tindakannya pun akan semakin brutal. Lebih ekstrim lagi, jika kepekaan dan rasa empati pada orang lain hilang, kekerasan pun akan mudah meledak menjadi anarki. Pada kondisi seperti ini alam bawah sadar (*id* dan *ego*) seseorang akan bisa mengalahkan *superego*nya dalam kondisi yang sadar.

Salah satu cara yang paling disarankan adalah *Role-Playing*. *Role playing* merupakan metode untuk melatih kepekaan emosi anak dengan meletakkan diri anak pada diri orang lain terutama orang yang kurang beruntung atau yang menjadi korban. Pada metode ini anak berfikir tentang kejadian tertentu dan menanyakan bagaimana perasaan anak jika dia menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Metode ini juga bisa dilakukan dengan menyebutkan contoh yang sama dengan pengalaman yang dimiliki oleh orang-orang dan merangkainya dengan kejadian yang terjadi. *Role playing* ini bisa dalam bentuk dongeng atau cerita yang didialogkan pada santri, maupun mengajak santri langsung melihat para korban atau pihak yang kurang beruntung misalnya orang cacat maupun anak yatim. Dengan kata lain, dalam metode ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman kognitif dan kepekaan emosi dia tentang situasi.

Bentuk *empathetic role-playing* menjadi sangat penting dalam mencoba untuk mengubah perilaku *deviant*, jika seorang anak mencuri, maka si anak diminta untuk membayangkan atau memainkan peran dalam sebuah situasi dimana dia menjadi salah satu korban pencurian. Metode ini merupakan cara yang cepat untuk merupah penilaian situasi benar-salah dalam perkembangan moral anak. Metode ini lebih efektif dalam waktu yang lama dibandingkan dengan hukuman. Hukuman mungkin bisa menghambat perilaku tertentu tetapi hukuman tidak menghasilkan perubahan kognisi dan pertimbangan moral.

Sebagai tambahan, untuk merubah kekuatan pertimbangan moral, bentuk *role-playing* seperti ini juga bisa untuk menambah stimulasi lingkungan tempat tinggal. Santri yang berasal dari lingkungan sosial yang penuh dengan peristiwa dengan perilaku yang tidak diinginkan atau santri yang di rumah kurang mendapatkan contoh perilaku positif harus distimulasi dengan cara yang memunculkan pengertian kognitif, juga dengan menunjukkan cara berfikir yang berbeda dengan perilaku yang santri lihat di kehidupan asal santri.

4. Kontrol sosial (Penegakan aturan)

Salah satu kontrol sosial adalah dengan menegakkan aturan dan tata tertib yang telah disepakati. Menindak yang salah, menghukum atau dengan bahasa yang populer di pesantren adalah *ta'zir*. Secara umum ada beberapa model hukuman (*ta'zir*) di pesantren seperti peringatan, kerja sosial, hukuman fisik sampai pemecatan dari kelompok. Secara filosofis tujuan menghukum ada beberapa (Darley & Pittman, 2003): Pertama yang dikemukakan oleh kelompok *utilitarianism*, yang menganggap bahwa hukuman mempunyai tujuan tertentu yakni ingin merubah perilaku seseorang (penjahat) agar lebih baik dimasa yang akan datang, Dengan kata lain diharapkan intensitas perilaku kriminal di masyarakat akan menurun. Prinsip ini mengikuti faham Behavioristik klasik dengan memberikan perlakuan yang tidak menyenangkan untuk mereduksi perilaku yang tidak diinginkan. Tetapi permasalahan konsep ini adalah sejauhmana lingkungan di luar pesantren dan di dalam pesantren mendukung tujuan hukuman. Jika tidak mendukung, maka santri yang melakukan pelanggaran akan mengalami reaktansi dan mengulangi perbutannya sebagai

bentuk protes. Dalam menegakkan aturan perlu adanya konsistensi dan konsensus. Konsistensi dalam arti bahwa aturan harus ditegakkan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan prosedur yang adil. Konsensus juga merupakan kondisi dimana dalam penegakan aturan harus disepakati dan dilaksanakan bersama oleh seluruh pengguna terutama pengurus dan pembina pesantren.

Pandangan kedua yaitu pandangan *rehabilitationism*, tetapi secara sosial termasuk faham yang optimistik dan tidak berhubungan dengan konsep hukuman (retribusi). Konsep rehabilitasi berupaya mengajak pelaku pelanggaran kejahatan agar melakukan pembenahan diri melalui pendidikan, *training* dan menyesuaikan sikap yang akan mendidik kembali para pelaku kejahatan, agar mempunyai modal dan motivasi menjadi anggota masyarakat yang berguna. Meskipun sama-sama utilitarian tetapi pandangan *rehabilitationist* ini lebih menekankan pada *Cognitive-behavior*, dengan mengajak pelaku pelanggaran menyadari bahwa perilakunya harus diubah.

Dalam upaya membentuk perilaku yang berkaitan dengan pembelajaran moral dan pendidikan kedisiplin merupakan pembahasan yang banyak dikaji dalam pendidikan. Cara-cara yang biasa digunakan dalam melakukan pendidikan nilai moral adalah dengan menghukum anak mulai dari yang ringan yang berupa ungkapan verbal yang menyakitkan hati hingga tidak jarang anak mendapatkan hukuman fisik yang tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan anak, yang tidak saja mengakibatkan luka fisik tetapi juga luka di hati (Kumara, 2007). Pro-kontra hukuman fisik yang dilakukan oleh orang tua atau pendidik dalam pengembangan moral, pada aspek kognitif dikemukakan oleh Murray Straus, (2000), yang mengatakan bahwa seorang anak yang mengalami pemukulan oleh orang tua akan mengambil kesimpulan "bahwa jika orang tua yang mereka cintai dan yang sangat mencintai anaknya saja, boleh memukul maka si anak tidak akan merasa bersalah jika anak memukul orang lain", sehingga anak akan mudah menyakiti orang lain.

Penelitian yang lain menunjukkan bahwa menghukum anak dengan hukuman fisik menimbulkan perilaku kekerasan di masa yang selanjutnya (Slife, 2000). Hukuman fisik juga memperlemah hubungan antara anak dan orang tua,

Hal ini menyebabkan penurunan kepekaan pada *self-monitoring*, baik pada anak maupun pada orang tua, sehingga orang tua tidak mampu mengamati potensi yang dimiliki oleh anak atau sebaliknya anak tak mampu membaca niatan baik dari orang tua atau pembina jika di pesantren.

Untuk menangani santri yang banyak, perlu tenaga yang besar untuk menciptakan ketertiban demi keamanan dan kenyamanan bersama, karenanya perlu adanya tata tertib, tentang apa yang boleh dan yang tidak dilakukan di pesantren. Tata-tertib ini juga merupakan pembelajaran moral. Agar menghasilkan hasil yang diharapkan, maka dalam pelaksanaannya pihak pengurus atau pembina harus mensosialisaikan apa manfaat tata tertib tersebut bagi santri. Misalnya "kenapa santri dilarang merokok?" harus dijelaskan secara rasional. Jika ada santri yang melanggar tata tertib tersebut harus ada mekanisme penanganannya. Dalam menjalankan tata tertib dan aturan pembina pesantren harus mempunyai konsensus yaitu kesepakatan antar pembina hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran kebenaran pada santri. Selain konsensus, pembina juga harus konsiten dari waktu ke waktu. Untuk mempertahankan konsensus dan konsistensi ini dibutuhkan komitmen yang luar biasa dari pembina. Memang menjadi pembina di pesantren sangat berat karena harus menjalankan *triple function*, yaitu sebagai ganti dari orang tua, guru di sekolah dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab atas moralitas bangsa.

E. Penutup

Kenakalan remaja memang telah menjadi problem nasional bahkan internasional. Bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam sebenarnya tidak perlu terlalu berkecil hati karena dalam ranah pendidikan kita telah mendapatkan warisan sebuah sistem pendidikan yaitu Pesantren. Pesantren merupakan ujung tombak pendidikan Islam yang menuntun kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut pesantren mempunyai sumber daya yang meliputi tradisi, dan sumber daya manusia, yang membuktikan bahwa pesantren merupakan bengkel moral yang bisa diandalkan. Perlu dicatat pula, bahwa masing-masing pesantren mempunyai potensi dan tradisi yang berbeda, sehingga aplikasi penanaman moral mungkin akan sedikit-banyak berbeda, dan

perbedaan inilah yang membutuhkan adanya modifikasi dalam pembinaan moral santri yang akan membawa pada tingkat moral yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- A'la, A. (2006) *Pemberdayaan pesantren*. Yogyakarta: LKiS
- Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), *Annals of child development. Vol. 6. Six theories of child development* (pp. 1-60). Greenwich, CT: JAI Press.
- Blasi, A. (2005). What should count as moral behavior? The nature of "early morality" in children's development. In W. Edelstein & G. Nunner-Winkler (Eds.), *Morality in context*. Amsterdam: Elsevier. 119–120
- Badan Narkotika Nasional, (2007) Situasi Permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. *Laporan Penelitian*; Jakarta.
- Calhoun, J.F. & Acocella, J.R. (1990) *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan. (Terjemahan)* Semarang: IKIP Press
- Daradjat, Z. (1985) *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Darley, J.M & Pittman, T. S. (2003). The Psychology of Compensatory and Retributive Justice. *Personality and Social Psychology Review*. 7. 324-336
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Eysenck, H.J. & Nias, D.K. (1978). *Sex Violence and the Media*. San Francisco: Harper and Row
- Flower, B. (2002) *Kid, who commit adult crimes*. New York: The Haworth Press.
- Gibbs, J.C. (2003). *Moral development and reality. Beyond the theories of Kohlberg and Hoffman*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Gibbs, J.C. (2006). Should Kohlberg's cognitive developmental approach to morality be replaced with amore pragmatic approach? Comment on Krebs and Denton. *Psychological Review*, 113, 666–671.
- Gibbs, J.C., Basinger, K.S., Grime, R.L., & Snary, J.R. (2007) Moral judgment across cultures: Revisiting Kohlberg's universality claims. *Developmental Review*, 27, 443–500.
- Gunarsa S.D et.al (1988) *Psikologi Remaja*. BPK Gunung Mulya: Jakarta

- Hoffman, M.L. (2000). *Empathy and moral development: Implications for caring and justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hurlock, E.B. (1998). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kartini, K. (2003), *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development*. San Francisco: Harper and Row.
- Kumara, A. (2007). Persistent persuasion; Upaya efektif penanaman nilai moral. *Psikologika*. 7. 107-1108.
- Nata, A. (1996). *Akhlaq tasawuf*. Jakarta: PT RajaGrasindo Persada.
- Palmer, E.J. (2003). An overview of the relationship between moral reasoning and offending. *Australian Psychologist*, 38(3), 165–174.
- Pizarro, D. (2000). Nothing more than feelings? The role of emotions in moral judgment. *Journal for the Theory of Social Behavior*, 30, 354–375.
- Pizarro, D.A. & Bloom, A. (2003) The intelligence of the moral intuitions: Comment on Haidt. *Psychological Review*, 110, 193–196.
- Priyanto, D. (2006) Inovasi kurikulum pesantren; memproyeksikan model pendidikan alternatif masa depan. *Ibda` Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 4. 20-37
- Santrock, J. (2003), *Life Span Development, (Terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sarwono, S.W (2003). *Psikologi dalam Praktek*. Editor Kaelany HD. Jakarta: CV Restu Agung.
- Slife, B. (2000). *Taking sides: Clasing views in controversial psychological issue*. Dushkin: McGraw-Hill
- Stafford, M.C. (2004). Juvenile Delinquency, In Ritzer, G. (Ed) *Handbook of social problem*. London: Sage Publications.
- Stams, G. J. J. M., Brugman, D., Deković, M., Van Rosmalen, L., Van der Laan, P.H., & Gibbs, J.C. (2006) The moral judgment of juvenile delinquents: A meta-analysis. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 34, 697–713.
- Stams, G.J.J.M., Dekovic, M Brugman, M., Rutten, E.A & Van den Wittenboer, G.L.H., Tavecchio, L.W.C., Hendriks, J & Van Schijndel, M. (2008). The relationship of punishment- and victim-based moral orientation to prosocial, externalizing, and norm trespassing behaviour in delinquent and non-delinquent adolescents: a validation study of the Moral Orientation Measure. *Journal of Experiment Criminology* 4:41–60

- Suti'ah, (2003) Metode pembelajaran aqidah akhlaq dengan pendekatan kognitif.
El Hikmah. 1. 25-52
- Straus, M.A. (2000). Ten myths that perpetuate corporal punishment. In Slife, B.
Taking sides: Clasing views in controversial psychological issue. Dushkin:
McGraw Hill. 96-104
- Tempo Interaktif (2005) *Tingkat kriminalitas Indonesia meningkat*.
Tempointeraktif_com diakses 12 Desember 2007.